

**PERAN AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN “MIGRATION WITH
DIGNITY” KIRIBATI MENGHADAPI MASALAH SEA LEVEL RISE DI PASIFIK
SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional*

Oleh:

RAISHA NADINA NUR FITRIA

E061181302

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN
"MIGRATION WITH DIGNITY" KIRIBATI MENGHADAPI
MASALAH SEA LEVEL RISE DI PASIFIK SELATAN

N A M A : RAISHA NADINA NUR FITRIA.

N I M : E061181302

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 1 Maret 2022



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304241991031002

Bama Andika Putra, S.IP, MIR
NIK. 199112172018073001

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN AUSTRALIA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN
"MIGRATION WITH DIGNITY" KIRIBATI MENGHADAPI
MASALAH SEA LEVEL RISE DI PASIFIK SELATAN

N A M A : RAISHA NADINA NUR FITRIA.

N I M : E061181302

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis,
24 Februari 2022.



Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Bama Andika Putra, S.IP, MIR

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

Surat Pernyataan Keaslian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raisha Nadina Nur Fitria

Nomor Induk : E061181302

Judul Skripsi : Peran Australia Dalam Mendukung Kebijakan "*Migration with Dignity*" Kiribati Menghadapi Masalah *Sea Level Rise* di Pasifik Selatan.

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi), serta bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 2 Maret 2022



10000
METERA
TEMPEL
BUD94AJX751134638

Raisha Nadina Nur Fitria

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, maha agung, pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiratNya atas segala kemudahan, keberkahan, dan ridho-Nya bagi penulis selama menjalani kewajiban akademik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemberi petunjuk kebenaran yang amat mencintai umatnya, keluarga, serta para sahabat pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kewajiban penulis sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Selama kurun waktu tiga tahun enam bulan menjalani proses perkuliahan di Jurusan Ilmu Hubungan internasional Universitas Hasanuddin, begitu banyak pembelajaran, dan pengalaman yang penulis dapatkan. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak serta pribadi yang telah memberikan andil besar selama proses perkuliahan hingga akhir skripsi ini:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya hingga hari ini, atas segala kemudahan dan keberkahan, serta petunjuk-Nya kepada penulis. Atas pemberian kesehatan, rejeki yang luas, ketenangan berfikir, dan kecerdasan emosional bagi penulis.

2. Orang tua penulis, yang sangat penulis sayangi, Ayah **Syafruddin Boy**, dan Mama **Mirnawati** atas segala doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang tulus pada penulis tanpa kenal lelah dan pamrih, menjalankan segala tanggung jawab sebagai orang tua untuk kebahagiaan penulis selama ini.
3. Kepada adik – adik penulis, **Qeisa Akbar** dan **Ghenniya Yelena Hafifah** yang selalu mendukung, meramaikan situasi, dan menyenangkan penulis. Terima kasih sudah menjadi adik – adik yang bertanggung jawab, menghargai dan menghormati penulis. Terima kasih atas segala pelajaran yang penulis dapatkan dari saudaraku ini.
4. Kepada **Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.** Terima kasih atas ilmu, dan arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di HI FISIP UNHAS.
5. Kepada Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M. Si** selaku Dosen Pembimbing I, dan Dosen Pembimbing Akademik, Bapak **Bama Andika Putra, S.IP, MIR.,** selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan, terutama dalam menyempurnakan penyusunan skripsi penulis.

6. Kepada seluruh **Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Pak Husain, Pak Adi, Pak Aspi, Pak Nasir, Pak Patrice, Bu Seni, Pak Agus, Pak Ishaq, Pak Bur, Bu Puspa, Pak Gego, Pak Aswin, Pak Aca, Bu Jannah.** Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada keluarga NTI, **Ummi, Abba, Puang Haris, Puang Ratna, Kak Kiky, Kak Feby, Bang Dani, Bang Sani, dan Awal** atas kebaikannya, keramah-tamahannya, keseruan, dan juga kasih sayang yang penulis rasakan selama ini, terutama di tahun – tahun penulis menjalani jenjang S1 di HI FISIP UNHAS.
8. Terimakasih kepada Pa'tuo **Maman Herdyaman** dan Umi **Nelmawati Noer** atas segala diskusi, doa, dukungan, kasih sayang yang tulus yang penulis rasakan untuk selalu fokus pada pendidikan dan bertanggung jawab atasnya.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis, atas segala dukungan yang diberikan hingga penulis bisa tumbuh diantara anggota keluarga yang mengutamakan pendidikan.
10. Terimakasih kepada sepupu terdekat penulis, **Nadhilah Aretha Syaidin, Ivani Khairunnisa, dan Rizkiansyah Syakdillah,** thanks for being here and stand by 24/7 untuk penulis.
11. Kepada jhs-besties, **Helmy, Ade Putri, dan Farhan Bazher,** *for all the laugh, full time support, and moments since 2013*©

12. Kepada *17 years friendship*, **Dimas, Rizky, Sari, Riri**, *thanks for all the moments and memories, also being 24/7 till now.*
13. Kepada PP Agang, **Isty Asad, Nurnaningsih, Yudi Fauzan, Andi Wingky, Yusril Ansari, Virda Mondigir, Andi Ainun**, dan **Ayu Maulida**. Terimakasih atas segala waktu, kebaikan, keseruan, dan hal-hal baik yang diberikan kepada penulis hingga hari ini.
14. *Honorable mention for all my good friends in HAHAAHIHI 2018*, **Rahmat Riyadi, Mario Kaishar, Latifah Ukhra, Farah Zhahirah, Fadhil Pramadiansyah, Daffa Raynanda, Nurfalah Anbar, Putri Alifia, Afni Zugito, Cece Mulyadi, Dewi Sukma, Hardian Noviyanto, Ayyub Alfarazz, Nahda Nurfadilah, Putri Nurul, Brenda Prisyella**, dan **Diaz Tirta**. *Thank you guys for all the kindness, help, support, time, memories, and moments. Im forever grateful!*
15. *Last but not least, I wanna thank me. Thank you for all the hard work, concistency, and patience through the ups and downs dunia perkuliahan. I deserved all of this, cheers.*

ABSTRAK

Raisha Nadina Nur Fitria. 2018. E061181302. “Peran Australia dalam Mendukung Kebijakan “*Migration with Dignity*” Kiribati menghadapi Masalah *Sea Level Rise* di Pasifik Selatan.” Pembimbing I : Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si. Pembimbing II : Bama Andika Putra, S.IP, MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan upaya adaptasi Kiribati melalui kebijakan “*Migration with Dignity*” yang dibuat pemerintah menghadapi masalah *sea level rise*, dan menggambarkan peran Australia dalam mendukung Kiribati menjalankan kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah tipe penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan sebab akibat dari suatu fenomena tertentu, dalam hal ini perubahan iklim dengan menguraikan data, fakta, dan argument yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kebijakan migrasi sebagai strategi adaptasi, pemerintah Kiribati membangun kapasitas-nya dalam merespon ancaman keamanan manusia yang timbul akibat *sea level rise*, dan memenuhi tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan hidup penduduk melalui program pendidikan dan pengembangan *skill*. Dalam hal ini, Australia memainkan peran sebagai aktor dominan regional dengan memberikan bantuan melalui AusAID. Bantuan luar negeri Australia sebagai negara donor digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kiribati sebagai negara penerima untuk mendukung kebijakan “*Migration with Dignity*”.

Kata kunci : Australia, Kiribati, Kenaikan Air Laut, *Migration with Dignity*.

ABSTRACT

Raisha Nadina Nur Fitria. E061181302. “Australia’s Role in Supporting Kiribati “Migration with Dignity” Policy on Facing Sea Level Rise Problem in the South Pacific”. Advisor I : Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M.Si. Advisor II : Bama Andika Putra, S.IP, MIR. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research is intended to describe Kiribati’s adaptation efforts through policy, called “Migration with Dignity” that the government has made to deal sea level rise problem, and to describe Australia’s role in supporting Kiribati on carrying this policy.

The research method in this thesis is a descriptive analytical type of research that describes the consequences of a certain phenomenon, in this case is climate change by describing data, facts, and arguments that relevant to the discussions.

The results of this research indicate that through migration as an adaptation policy, Kiribati government builds their capacity in responding human security threats, sea level rise, the government also addresses the responsibility to improve lives of the populations through education program and skills development. In this regard, Australia plays a role as the dominant regional actor by providing assistance through AusAID. Australia’s foreign aid as a donor country meet the nees of Kiribati as recipient country to support “Migration with Dignity” Kiribati.

Keywords: Australia, Kiribati, Sea Level Rise, Migration with Dignity.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. <i>Human Security</i>	18
B. <i>Foreign Aid</i>	28
BAB III GAMBARAN UMUM	39
A. <i>Sea Level Rise</i> di Pasifik Selatan	39
B. Upaya Adaptasi dan Mitigasi terhadap <i>Sea Level Rise</i>	48
C. Kebijakan <i>Foreign Aid</i> Australia di Pasifik.....	58
BAB IV ANALISIS	66
A. Implementasi “ <i>Migration with Dignity</i> ” Kiribati dalam menghadapi Masalah <i>Sea Level Rise</i> di Pasifik Selatan	66
B. Peran Australia dalam Mendukung Kebijakan “ <i>Migration with Dignity</i> ” Kiribati	78
BAB V	91
PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
Daftar Pustaka	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang sangat mudah beradaptasi. Sejak zaman prasejarah, manusia mengikuti variasi iklim bumi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sumber makanan, pola kehidupan bergantung pada iklim dan fenomena cuaca. Bumi merupakan ekosistem yang didominasi oleh manusia. Kehidupan manusia didalamnya seperti pelepasan karbon, produksi limbah, dan pembukaan lahan perlahan mengubah permukaan planet bumi dan pola pemanasan cuaca (Hayden, 2021). Kegiatan tersebut secara tidak sengaja membuat perubahan di lingkungan. Seperti polusi udara, hujan asam, dan penipisan lapisan ozon.

Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena alam yang menjadi ancaman bagi masyarakat global saat ini. Menurut para ahli, faktor antropogenik secara signifikan telah berkontribusi terhadap masalah – masalah yang menimbulkan fenomena tersebut. Perubahan iklim adalah sebuah permasalahan lingkungan yang timbul akibat perbuatan manusia itu sendiri. Pola kegiatan industri, transportasi, dan sifat konsumtif manusia merupakan sebagian besar penyebab terjadinya perubahan iklim yang saat ini mulai dirasakan dampaknya oleh negara – negara di dunia. Fenomena alam ini meningkatkan kesenjangan sosial dan kerusakan parah.

Pada awal abad ke-21, suatu panel ilmiah yang terdiri dari 100 ahli dari berbagai disiplin ilmu diminta oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) untuk memeringkat berbagai permasalahan lingkungan hidup berdasarkan skala dampak yang telah timbul pada abad ke-21. Peringkat teratas dari permasalahan lingkungan hidup tersebut adalah perubahan iklim. Perubahan iklim telah secara ilmiah dibuktikan dan diakibatkan oleh pemanasan global atau yang biasa dikenal dengan kata *global warming* sebagai akibat dari efek rumah kaca atau *green house gasses* (Adibroto, 2011)

Gas rumah kaca merupakan kandungan gas yang terperangkap di atmosfer dan menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer menangkap panas matahari untuk menghangatkan bumi. Gas tersebut timbul secara alami, namun bisa juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Efek rumah kaca sangatlah penting, karena berkontribusi pada kelangsungan hidup di bumi. Tanpa efek rumah kaca, temperature di bumi akan menjadi 0 derajat Fahrenheit (Kazmeyer, 2018)

Era globalisasi yang diiringi dengan percepatan teknologi sekarang ini menyebabkan produksi gas rumah kaca berlebih. . Hal – hal lain yang berperan atas berlebihnya produksi rumah kaca adalah aktivitas penebangan hutan, urbanisasi dan juga desertifikasi. Hal tersebut menimbulkan masalah yang dihadapi umat manusia sekarang ini, dan berdampak pada bidang ekonomi, politik, serta lingkungan. Dampak lingkungan yang timbul seperti meningkatnya permukaan air laut, hilangnya sumber daya, dan fungsi pariwisata di wilayah pesisir, serta nilai budaya masyarakat, juga turunnya

kualitas tanah dan air. Jika manusia terus bergantung pada bahan bakar fosil, maka konsekuensi yang dirasakan adalah semakin meningkatnya suhu bumi (Hardy, 2003)

Iklim dunia secara global sedang mengalami kerusakan sebagai konsekuensi dari aktivitas dan kegiatan manusia yang dimulai dari aktivitas industri, dan transportasi. Aktivitas tersebut meningkatkan konsentrasi gas – gas yang menghalangi pantulan energi sinar matahari dari bumi sehingga menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan mengakibatkan planet bumi semakin panas. Peningkatan suhu rata – rata ini mempengaruhi pola iklim. Perubahan iklim mulai dirasakan pada ekosistem alami di darat dan di laut. Perubahan tersebut beragam di berbagai wilayah di dunia, dipengaruhi oleh tingkat pemanasan, dan curah hujan. Panas bumi yang semakin meningkat menimbulkan cairnya gletser dan es di kutub.

Seiring dengan berubahnya temperatur bumi yang diakibatkan oleh produksi karbon berlebih, terjadi peningkatan air laut secara global. Menurut kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, sejak tahun 1850, tahun dengan suhu terpanas terjadi dalam 12 tahun terakhir (Adibroto, 2011). Kenaikan suhu membuat gletser atau lapisan es yang meleleh menambah volume air di lautan. Selain itu, karena perubahan iklim, curah hujan salju berkurang, sehingga gletser tidak dapat membeku lebih cepat daripada biasanya. Maka dari itu, semakin meningkatnya temperature bumi, air laut akan terus meningkat. Mencairnya es di Arktik menimbulkan permasalahan lain

seperti penurunan intensitas curah hujan, kekeringan, gelombang panas, bahkan banjir bandang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *National Oceanic and Atmospheric Administration* (Badan Ilmu Sains & Informasi Iklim AS), pada tahun 2019, permukaan laut rata – rata global adalah 3,4 inci (87,61 mm) yang merupakan rata tahunan tertinggi dalam catatan satelit sejak tahun 1993 hingga sekarang. Pada tahun 1993, permukaan air laut naik dengan kecepatan 0,11 hingga 0,14 inci pertahun, dan diperkirakan dua kali lebih cepat. Sementara dari 2018 hingga 2019, permukaan laut global naik hingga 0,24 inci atau 6,1 milimeter (Rebecca Lindsey, 2020). Pemanasan global tersebut menimbulkan melelehnya es di arktik sehingga menimbulkan naiknya permukaan air laut dan menyebabkan pulau bahkan negara kepulauan yang berdataran rendah tenggelam.

Kiribati merupakan sebuah negara yang terletak di antara Australia dan Hawaii, Tarawa merupakan ibu kota negara kepulauan ini. Kiribati merupakan salah satu negara yang terletak di Samudera Pasifik. Kiribati adalah salah satu negara yang paling ter-isolasi, negara ini berlokasi kurang lebih sekitar 100km dari garis khatulistiwa (Bowers, 2017). Negara kepulauan yang wilayahnya di kelilingi samudera ini merupakan wilayah yang pertama kali merasakan dampak peningkatan permukaan air laut yang mengancam wilayah negara serta penduduk di dalamnya.

Pada pengamatan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2016, setengah dari total rumah tangga di Kiribati merasakan dampak kenaikan permukaan air laut. Negara dengan jumlah penduduknya kurang lebih 110.000 jiwa ini memiliki luas wilayah sekitar 811 km. Titik tertinggi wilayah ini hanya 81 meter di atas permukaan laut (*Country Profile - Kiribati*, n.d.).

Kenaikan permukaan air laut, berdampak pada negara kepulauan di Pasifik Selatan, khususnya Kiribati. Air laut menggenangi lahan pertanian dan sumber mata air. Bagi para penduduk Kiribati, daratan maupun lautan memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan budaya. Wilayah lautan berfokus pada perkapalan, maritim, perikanan, prospek minyak dan gas, serta wisata. Keindahan alam Kiribati menghasilkan pemasukan bagi negara. Perubahan iklim dan dampaknya membuat seluruh sektor berdampak bagi kehidupan masyarakat (Mulhern, 2020).

Pemanasan global menjadi salah satu masalah yang mendesak. Diperlukan adanya tindakan global untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapi akibat perubahan iklim membuat pemerintah dunia membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak, dan berfokus pada upaya mitigasi dan adaptasi. Menghadapi krisis lingkungan bukan hanya tugas suatu pemerintah ataupun suatu organisasi internasional. Tetapi diperlukan juga aksi kolektif dari berbagai elemen masyarakat.

Sebagian besar populasi dunia mengalami kesulitan akibat dampak dari perubahan iklim. Pada tahun 2009, diperkirakan 300.000 orang meninggal setiap tahun akibat dampak perubahan iklim. Negara berkembang, yang memiliki keterbatasan teknologi dan ekonomi lebih rentan terhadap perubahan iklim (Lukose, 2017). Merupakan sebuah tanggung jawab tiap negara untuk memprioritaskan nilai kemanusiaan dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

Kenaikan permukaan air laut dapat berakibat buruk bagi penduduk pesisir, karena harus meninggalkan rumah karena air merendam tanah di pemukiman dan juga habitat pesisir. Kenaikan permukaan air laut menimbulkan permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti pembangunan, produksi pangan, dan kesehatan. Dampaknya ialah masyarakat terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Perubahan iklim yang mendesak di lingkungan mempengaruhi perpindahan, baik di dalam wilayah negara mereka, maupun ke wilayah negara lain. Pemerintah Kiribati melakukan upaya adaptasi skala besar dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Bagi negara kecil di Pasifik seperti Kiribati, kegagalan negosiasi iklim mengantarkan pada migrasi penduduk akibat dari dampak perubahan iklim itu sendiri. Bagi Kiribati dan negara kepulauan lainnya yang terdampak perubahan iklim, tidak ada pilihan lain selain menjadikan migrasi sebagai bagian sentral dari perencanaan masa depan dan keberlangsungan hidup penduduknya.

Fenomena alam ini merupakan fenomena multidimensi sebagai salah satu peristiwa geofisik yang dipicu oleh adanya kegiatan ekonomi dan

membawa dampak pada kehidupan manusia secara biologis. Diperlukan peran dan kemauan politik dalam upaya penanganannya. Presiden Kiribati, Aneta Tong (2003 – 2016) mengeluarkan kebijakan yang disebut *Migration with Dignity*. Kebijakan tersebut merupakan sebuah strategi yang dikeluarkan Pemerintah Kiribati. Perubahan iklim dan cuaca buruk berdampak terhadap seluruh sektor, sehingga negara tertinggal bergantung pada bantuan.

Australia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kiribati dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim dan dampaknya. Australia berkontribusi untuk membantu Kiribati menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan migrasi, serta penyediaan lapangan kerja masyarakat muda Kiribati (DFAT Australia, n.d.).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak kenaikan air laut sebagai akibat dari perubahan iklim dan upaya adaptasi melalui kebijakan *Migration with Dignity* Kiribati, serta dukungan yang diberikan oleh Australia sebagai peran utama dalam mendukung upaya adaptasi Kiribati menghadapi *sea level rise* di Pasifik Selatan.

Berdasarkan batasan penelitian dan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merangkum dua rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kebijakan *Migration with Dignity* dijalankan oleh pemerintah Kiribati sebagai upaya adaptasi terhadap dampak kenaikan air laut sebagai akibat dari perubahan iklim?
- 2) Bagaimana peran Australia dalam mendukung Kiribati menghadapi dampak kenaikan air laut sebagai akibat dari perubahan iklim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan *Migration with Dignity* dijalankan oleh pemerintah Kiribati sebagai upaya adaptasi terhadap dampak kenaikan air laut akibat dari perubahan iklim.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Australia dalam mendukung Kiribati menghadapi dampak kenaikan air laut sebagai akibat dari perubahan iklim.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan pengetahuan baru bagi studi Hubungan Internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, dan swasta dalam merancang strategi kerjasama, dan adaptasi menghadapi permasalahan perubahan iklim.

D. Kerangka Konseptual

1.4.1 *Human Security*

Keamanan bukanlah konsep baru dalam ilmu sosial. Keamanan merupakan hal penting dalam sistem internasional. *Human security* merupakan inti dari kemanusiaan, kehidupan manusia harus dilindungi dan jauh dari adanya ancaman. Beberapa masyarakat global terancam oleh hal atau peristiwa yang jauh diluar kendali, seperti krisis keuangan, konflik, kekerasan, wabah penyakit, dan kerusakan alam. Keamanan manusia adalah sebuah kondisi yang dihasilkan dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ancaman keamanan manusia berada di tingkat nasional maupun internasional (Sudha, 2007). Untuk menerapkan konsep *human security*, diperlukan sikap proaktif terhadap ancaman itu sendiri.

Konsep *Human Security* menurut Laporan *United Nations Development Program* (UNDP), mendefinisikan bahwa tiap individu memiliki hak bebas dari rasa takut, dan menentukan keinginannya (Alkire, 2003). Dengan itu diartikan bahwa manusia harus dipenuhi kebutuhan dasarnya agar kelangsungan hidup tetap terjaga dan jauh dari ancaman. Kehidupan manusia harus bebas dari rasa takut (Burhanuddin, 2017).

Selanjutnya, Roland Paris mendefinisikan *human security* sebagai kategori penelitian yang luas mengenai ancaman militer ataupun non-militer. Ancaman militer di definisikan sebagai keamanan nasional, dan juga konflik internal suatu negara. Ancaman non-militer seperti krisis ekonomi, dan krisis lingkungan yang merupakan ancaman bagi individu, dan juga kelompok sosial. Krisis lingkungan sebagai agenda keamanan tradisional juga merupakan agenda global yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan negara. Isu lingkungan telah dilihat sebagai bagian dari *human security* sejak berakhirnya perang dingin. Menandai bahwa bipolaritas politik sebagai konsep keamanan saat itu telah berakhir (Dokos et al., 2008).

Menurut Laporan *World Bank Group* mengenai pembangunan manusia, *human security* merupakan perpaduan dari berbagai bidang studi yang berfokus pada resiko dan kerentanan (bencana alam, kesehatan, kekerasan, ekonomi, politik, dan lingkungan). Diperlukan upaya pencegahan, dan mitigasi yang berbeda. Konsep keamanan manusia termasuk elemen penting dalam hubungan internasional karena merupakan kerangka kerja konseptual untuk tindakan internasional. Tujuan dari *human security* adalah untuk melindungi kehidupan manusia dari ancaman atau krisis jangka panjang. Menurut Lawrence Freedman, segala sesuatu yang menimbulkan kecemasan atau mengancam kualitas hidup manusia, dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan keamanan manusia adalah dengan memberikan “nama” bagi ancaman yang harus ditanggapi dan dikembangkan. Unsur - unsur yang dapat disebut sebagai ancaman keamanan diantaranya

adalah: (1) segala sesuatu yang mengancam secara drastis dan dapat menurunkan kualitas hidup penduduk suatu negara dalam rentang waktu tertentu; dan (2) ancaman tersebut secara signifikan mempersempit pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah suatu negara, swasta, ataupun entitas non-pemerintah (Alkire, 2003).

Konsep *human security* atau keamanan manusia dalam permasalahan yang dialami masyarakat negara kepulauan kecil dan berkembang (SIDS) berkaitan erat dengan adanya ancaman yang timbul dari dampak kenaikan permukaan air laut seperti berkurangnya sumber daya alam, degradasi lingkungan, perubahan pola iklim dan cuaca regional yang mempengaruhi tingkat kelaparan, kemiskinan dan angka pengangguran.

Perubahan iklim menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan manusia. Beberapa dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan diantaranya adalah polusi udara yang dapat menyebabkan stroke ataupun serangan jantung dan penyakit paru paru. Diperkirakan polusi udara menyebabkan 3,6 – 9 juta kematian pertahun (McKeever, 2021). Perubahan iklim juga meningkatkan resiko penyakit yang dapat ditularkan melalui air.

Maka dari itu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, garda terdepan yang akan merasakan dampak meningkatnya volume air laut adalah negara negara kepulauan, salah satunya Kiribati. Negara kepulauan ini diperkirakan tidak akan bertahan hingga 2050 (Becky et al., 2019).

Para pemimpin negara perlu mengambil tindakan sebelum krisis lingkungan global semakin tidak terkendali. Menurut *International Institute for Environment and Development* (IIED), *environment security* sebagai area dari *human security* muncul karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Perubahan iklim menghadirkan ancaman baru bagi keamanan manusia, konsekuensi sangat jelas dari perubahan iklim adalah perpindahan dan migrasi keluarga (Dokos et al., 2008).

1.4.2 Foreign Aid

Bantuan luar negeri telah mendapat perhatian politik pada abad ke 21. Masyarakat internasional mulai menyepakati berbagai tujuan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan pendidikan, kesetaraan gender, meningkatkan kesehatan, dan menghentikan penyebaran penyakit. Para pemimpin dunia berfokus pada peningkatan bantuan bagi negara negara yang membutuhkan (Veiderpass & Anderson, 2007). Bantuan luar negeri juga memberikan dampak pertumbuhan bagi negara – negara miskin.

Terdapat beberapa pendapat mengenai bantuan luar negeri, dari negara maju ke negara berkembang. Beberapa mendukung program bantuan asing diperlukan untuk membantu negara – negara miskin. Bantuan dapat berupa keterampilan, teknologi, ataupun pinjaman dari pemerintah ke pemerintah (Griffiths & O’Callaghan, 2002).

Definisi paling dasar dari istilah bantuan atau sumber daya yang diberikan dari satu negara ke negara lain dipahami sebagai uang, bahan, dan

jasa yang diberikan atau dipinjamkan oleh pemerintah, organisasi, dan individu di negara kaya untuk membantu negara miskin. Disebutkan bahwa bantuan luar negeri dilakukan untuk kepentingan negara penerima ataupun penduduknya (Hasan, n.d.).

Menurut Clemens, bantuan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga kategori (1) darurat; (2) bantuan yang mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama; dan (3) bantuan yang mempengaruhi pertumbuhan dalam waktu singkat. Kategori kedua termasuk bantuan untuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kategori ketiga meliputi anggaran, investasi, infrastruktur, dan bantuan untuk sektor produktif (Veiderpass & Anderson, 2007).

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* memiliki pengertian berbeda yang berdasarkan teori dalam hubungan internasional. Menurut pandangan realisme, *foreign aid* merupakan sebuah alat kebijakan pada masa perang dingin untuk memengaruhi negara – negara penerima bantuan. Dalam pandangan liberalisme, bantuan luar negeri adalah sebuah langkah program yang dirancang untuk meningkatkan sosial – dan ekonomi negara penerima. Sementara dalam *world system theory*, hal tersebut merupakan cara untuk membatasi perkembangan negara penerima.

Foreign aid merupakan bantuan luar negeri yang menjadi kewajiban segelintir negara maju terhadap negara berkembang, atau negara kaya terhadap negara miskin. Bantuan dana, barang, dan jasa dari satu negara ke negara lain

merupakan bantuan luar negeri kemanusiaan yang bersifat non-politis. Bantuan tradisional ini meluas ke negara yang menjadi korban bencana alam, wabah penyakit, ataupun kelaparan (Morgenthau, 2012).

Ahli teori realisme, Hans Morgenthau berpendapat bahwa terdapat lima tujuan yang membedakan bantuan luar negeri. Diantaranya adalah (1) militer; (2) ekonomi; (3) kemanusiaan; (4) pertanian; dan (5) *prestige*. Hal tersebut memiliki pengaruh atau strategi ‘propaganda’ dan ‘suap’. Bantuan luar negeri menciptakan hubungan ‘psikologis’ antara negara pemberi dan penerima. Pemberian bantuan tersebut menarik aspirasi internasional untuk memberikan pengakuan kepada negara pendonor. Sementara ‘suap’ melibatkan pertukaran loyalitas yang dibayar dengan layanan politik (Griffiths & O’Callaghan, 2002).

Menurut Sahlins, setidaknya terdapat tiga jenis alokasi dana, yaitu (1) pertukaran ekonomi; (2) redistribusi; dan (3) pemberian. Pertukaran ekonomi atau *economic exchange* mengacu pada pertukaran barang atau jasa antara dua pihak. Redistribusi, sebaliknya merupakan alokasi dana atau sumber daya melalui otoritas pusat yang telah memenuhi standar yang ditentukan. Bentuk ketiga ialah *giving* atau pemberian secara sukarela seperti ekonomi dan tidak melibatkan pengembalian ataupun timbal balik politik (Hattori, 2010).

Dari penjelasan diatas, *foreign aid* sebagian besar jatuh pada kategori ketiga. Bantuan asing tersebut dianggap sebagai donor dari suatu negara ke negara penerima. Jenis *foreign aid* yang bersifat *giving* atau pemberian sukarela biasanya dilakukan karena adanya kesenjangan diantara pemberi dan penerima

bantuan. Bantuan tersebut mencakup bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga bencana.

Pemberian bantuan luar negeri tanpa adanya timbal balik dari negara penerima, dilakukan oleh negara pemberi untuk menjalankan peran dan pengaruh aktif untuk memperkuat dan memperluas posisi mereka. Menurut Pierre Bourdieu, bantuan asing tersebut dipahami sebagai dominasi simbolik untuk memperhalus hirarki sosial. Pemberian tersebut merupakan praktik dominasi simbolik yang sangat efektif karena menyangkut alokasi bantuan yang dibutuhkan negara penerima (Hattori, 2010).

Resiko dari peningkatan permukaan air laut hadir dalam jangka pendek dan panjang. Dibutuhkan investasi yang besar dalam infrastruktur dan perlindungan terhadap masyarakat dan lokasi terdampak. Diperlukan adanya biaya untuk beradaptasi, kemungkinan besar biaya tersebut berada diluar kemampuan finansial suatu negara.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Tipe penelitian ini menggambarkan mengenai sebab akibat dari suatu fenomena, ide, atau gejala tertentu. Serta menggambarkan data atau fakta yang ditemukan selama penelitian secara objektif. Dalam hal ini mengenai kebijakan “*Migration with Dignity*” yang dijalankan oleh Pemerintah Kiribati dan peran Australia dalam mendukung kebijakan tersebut. Metode ini dianggap

relevan dengan kebutuhan penelitian, dan dapat menyajikan kesimpulan yang menyeluruh dari proses penyimpulan secara kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan mengambil atau mencari data sekunder dari permasalahan yang dikaji melalui studi literature seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel dan laporan. Pengumpulan data diambil dari sumber referensi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. Tahap penelitian ialah mengidentifikasi masalah serta menganalisis data dan fakta yang ditemukan.

3. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian akan disajikan dengan teknik analisis kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan penekanan utama pada sumber yaitu menggunakan teknik yang menjelaskan, dan menggambarkan objek yang diteliti dengan sistematis.

4. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Analisis penelitian akan dipaparkan secara umum ke khusus dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini tersusun ke dalam lima bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat deskripsi teoritis konsep yang menjadi acuan penelitian yang relevan sebagai landasan utama dari penelitian.

BAB III Gambaran Umum menggambarkan secara garis besar permasalahan *sea level rise* di Pasifik Selatan serta rincian kebijakan “*Migration with Dignity*” Kiribati dan Peran Australia dalam mendukung kebijakan tersebut.

BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian menyajikan hasil penelitian setelah melalui proses analisis data yang telah dikumpulkan dengan menguji hipotesis serta landasan konsep yang menjadi acuan berpikir dalam penelitian ini.

BAB V Kesimpulan berisi rangkuman keseluruhan hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah dan tujuan yang diajukan dalam penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Human Security

Sebagai sebuah konsep yang membahas individu, keamanan manusia berkaitan erat dengan konsep lainnya, yaitu hak asasi manusia. *People – centered* dalam *human security* menempatkan individu sebagai pusat analisis dan tindakan. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai keamanan manusia yang terancam akibat perubahan iklim global yang terjadi. Beberapa individu yang terdampak langsung oleh perubahan iklim, mulai melakukan migrasi massal dari tempat tinggal mereka ke tempat yang lebih aman dan layak, bahkan melakukan lintas batas negara sebagai bagian dari hak setiap individu.

Pendekatan khusus yang membahas konsep keamanan manusia dalam hubungan internasional selalu diawali dengan refleksi sejauh mana ‘keamanan’ menjadi konsep dasar. Berakhirnya perang dingin telah menciptakan peluang atau harapan bahwa keamanan akan diperluas. *Human security* dipandang sebagai respons terhadap tidak adanya keamanan. Meningkatnya isu – isu ketimpangan ekonomi dan lingkungan, serta pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan individu sebagai objek keamanan untuk memahami situasi dan memperbaikinya (McDonald, 2010).

Istilah keamanan manusia telah digunakan oleh berbagai lembaga untuk merujuk pada kelompok kegiatan di bidang seperti bantuan bencana. *Human security* menyiratkan bahwa komunitas internasional dan warga dunia harus

dapat berbuat sesuatu untuk melindungi dan memberdayakan mereka yang paling rentan terhadap ancaman (Hunter, 2013). Saat ini, politik, ekonomi, sosial, lingkungan, nasional, regional, bahkan individu telah menjadi komponen keamanan. Komponen tersebut mampu meningkatkan ketidak-amanan manusia dan mengancam ketentraman masyarakat. *Human security* sebagai salah satu ancaman tradisional menjadi penting karena membahas penyebab yang membahayakan dan mengancam manusia.

Keamanan manusia adalah sebuah konsep yang mengidentifikasi keamanan kehidupan tiap individu sebagai pusat tujuan kebijakan keamanan nasional dan internasional. Menurut Mary Kaldor, saat ini manusia rentan terancam oleh jenis ‘perang baru’ yaitu terkait dengan ancaman global non-militer. Demikian pula, menurut Mahbub Ul Haq, konsep keamanan manusia memasuki era baru dimana konsep tersebut berubah – ubah. *Human security* merupakan bagian dari keamanan negara (Fukuda-Parr & Messineo, 2012).

Bahkan keamanan manusia dapat terancam dari sejumlah ancaman langsung maupun tidak langsung. Faktor yang menimbulkan ancaman secara langsung maupun tidak langsung tersebut mampu menurunkan kualitas kehidupan manusia, merampas individu dari kebutuhan dasar, dan mengabaikan keselamatan yang secara langsung memiliki pengaruh pada keamanan keseluruhan negara.

Faktor ancaman langsung maupun tidak langsung bagi keamanan individu, dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) ancaman yang berasal dari sistem fisik, biasanya bencana alam; (2) ancaman ini mengancam

keberlangsungan hidup manusia yang berasal dari sistem kehidupan, seperti pandemi kesehatan, kelaparan, dan juga kurang gizi; dan (3) ancaman yang timbul dari sistem sosial, seperti kekerasan, pembunuhan, genosida, pemerkosaan, terorisme, dan perang (Tanaka, 2015).

Menurut Rothschild, konsep keamanan manusia memperluas cakupan analisis dan kebijakan. Hal tersebut meluas kebawah, dalam hal ini kelompok dan individu. Lalu meluas ke atas, yaitu keamanan sistem global atau internasional. Cakupan tersebut juga meluas secara horizontal, seperti keamanan militer, politik, ekonomi, dan lingkungan, serta sosial contohnya opini publik, dan juga media massa ataupun pers (Fukuda-Parr & Messineo, 2012).

Terdapat tujuh dimensi penting dari keamanan manusia, diantaranya: (1) keamanan ekonomi, ditandai dengan pekerjaan, sumber daya publik yang terjamin; (2) keamanan pangan, adanya jaminan akses terhadap makanan pokok; (3) keamanan kesehatan, adanya akses tiap individu terhadap layanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan, hal ini berkaitan dengan terlindungnya manusia dari degradasi lingkungan, dan juga bencana alam; (5) keamanan pribadi, terlindungnya tiap individu dari kekerasan fisik, konflik, dan kejahatan; (6) keamanan komunitas, terlindungnya komunitas masyarakat dari penindasan dan konflik etnis, maupun perang saudara; dan (7) keamanan politik, kebebasan tiap individu atas hak berpolitik, da juga penindasan serta pelanggaran HAM yang dilakukan negara (Fukuda-Parr & Messineo, 2012).

Konsep *human security* ini diawali oleh keamanan lingkungan yang berfokus pada sumber daya alam terbarukan. Berdasarkan definisi keamanan manusia dalam laporan *United Nations Development Program* (UNDP), *environment security* merupakan salah satu dari tujuh kategori utama ancaman terhadap keamanan manusia. Ancaman yang berasal dari lingkungan global yang disebabkan oleh manusia ini menyebabkan perubahan secara luas. Dalam perspektifnya, keamanan lingkungan bertujuan untuk menjaga biosfer sebagai penyangga kehidupan untuk melindungi kesejahteraan manusia, kesehatan, atau bahkan keberadaannya semata.

Keamanan manusia menjadi pendekatan yang digunakan dan terus berkembang sepanjang abad ke-21, karena penyebab keamanan manusia terus menerus muncul baik di negara berkembang ataupun negara maju. Pandangan terhadap keamanan manusia menawarkan jawaban yang berbeda mengenai pertanyaan tentang ancaman terhadap keamanan, siapa yang memberikan keamanan, dan bagaimana keamanan tersebut diberikan. Keamanan manusia telah digunakan untuk mengamankan individu di tingkat nasional, komunitas, dan juga individu (Peou, 2014).

Para ilmuwan HI sepakat bahwa ancaman lingkungan atau *environmental threats* sebagai masalah yang saat ini sangat menonjol ditingkat global dan paling mendesak untuk ditangani (Bakry, 2017). Hubungan antara lingkungan dan *human security* ini dapat dipahami secara berbeda tergantung masing – masing kawasan atau negara. Kerusakan lingkungan global seperti naiknya permukaan air laut menjadi perhatian bagi masyarakat yang tinggal di

dekat pantai. Sementara mencairnya gletser merupakan ancaman bagi masyarakat yang tinggal di dekat wilayah arktik, seperti kawasan Eropa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode dalam memastikan keamanan manusia dan degradasi lingkungan.

Paradigma dalam penelitian ini diantaranya adalah *sea level rise* sebagai salah satu dampak perubahan iklim global yang merupakan salah satu fenomena alam dan menimbulkan dampak secara langsung serta mengancam tiap individu di sektor pesisir. Degradasi lingkungan sebagai bagian dari *environmental security* menimbulkan kerentanan terhadap akses sumber daya air tawar, perekonomian, dan sosial. Sehingga, beberapa penduduk dan pemerintahan negara terdampak mulai melakukan upaya mitigasi dan adaptasi.

Pertama dan terpenting, pendekatan terhadap keamanan manusia berpusat pada orang, atau *people-centred*. Pendekatan ini mempertimbangkan jangkauan yang luas mengenai kondisi yang mengancam kelangsungan hidup, penghidupan, martabat, dan komunitas. Pendekatan ini saling terkait dengan tantangan yang dihadapi individu untuk bebas dari keinginan, ketakutan dan penghinaan (UNDP, 2016).

Manusia dianggap memiliki hak – hak sipil, ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan analisa yang membantu mengutarakan situasi individu dan komunitas. Hal tersebut pula yang mempermudah pemahaman yang lebih tentang bagaimana individu maupun komunitas sosial mengalami jenis ancaman dan kerentanan. Dengan berfokus pada individu, *human security* mencakup semua aspek kebutuhan dan

juga pemenuhan dasar dari kebebasan sosial, baik kebebasan dari rasa takut, maupun kebebasan dari kekurangan.

Kepentingan dan keamanan individu sebagai fokus menjadikan kondisi setiap warga negara hidup dalam kebebasan dan berpartisipasi sepenuhnya. Setiap individu berhak menikmati perlindungan atas hak dasar-nya dan memiliki akses terhadap sumber daya dan kebutuhan dasar. Termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang tidak membahayakan keberadaan tiap – tiap individu.

Bagi banyak orang, dunia saat ini merupakan tempat yang tidak aman, ancaman bermunculan di berbagai aspek. Bencana alam, pandemi kesehatan, terorisme internasional, dan juga kemerosotan ekonomi menimbulkan lemahnya prospek pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan juga stabilitas. Berbagai hal tersebut menimbulkan ketidak-amanan manusia yang mana dapat menyebar dan melintasi batas negara (Nautiyal, 2014)

Banyaknya aktor (pemerintah, swasta, organisasi internasional, peneliti, para ahli, dan lembaga) menggunakan istilah *human security* untuk tujuan berbeda dalam menentukan agenda kebijakan ataupun analisis. Kebijakan luar negeri, diplomasi internasional, dan kerangka analitis untuk evaluasi menjadikan keamanan manusia sebagai usulan untuk diprioritaskan. Karena keamanan manusia bersifat luas, hal tersebut menjadikannya dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu konsep *human security* secara luas dan sempit (Fukuda-Parr & Messineo, 2012).

Konsepsi luas berkaitan dengan kerentanan manusia secara keseluruhan, dan mencakup ancaman dari berbagai sumber. Sementara konsepsi sempit, berfokus pada ancaman kekerasan yang terorganisir. Maka, dapat dikatakan keamanan manusia memiliki dua aspek utama yaitu keselamatan dan juga perlindungan dalam pola kehidupan, baik di rumah, pekerjaan, ataupun komunitas.

European Union (EU) telah mengakui bahwa perubahan iklim sebagai ancaman utama keamanan manusia. Dalam laporannya, Uni Eropa merilis tentang keamanan internasional yang disebabkan oleh perubahan iklim yang mengancam stabilitas keamanan komunitas manusia didalamnya. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai pidato, dan laporan, penelitian serta artikel media telah mengeluarkan peringatan mengenai permasalahan yang muncul akibat pola iklim dan sumber daya yang langka. Permasalahan yang timbul dan disebabkan oleh perubahan lanskap lingkungan ini, menimbulkan wacana keamanan manusia. Perubahan iklim mulai dianggap oleh beberapa aktor dan menempatkannya dalam agenda keamanan.

Penelitian sebelumnya telah fokus pada beberapa pemerintahan negara yang telah merasakan dampak perubahan iklim global, namun belum menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari kebijakan nasional. Salah satunya, ialah aktor dominan di kawasan Asia Selatan. Pemerintah India menganggap bahwa masalah migrasi iklim yang melewati lintas batas suatu negara berdampak ke negara yang lebih aman demi keberlangsungan hidup dan juga bagian dari kerangka keamanan manusia, bukanlah sebuah ancaman

keamanan nasional maupun internasional. Migran iklim dari Bangladesh yang masuk ke India ini, disoroti oleh Pemerintah India sebagai kebutuhan manusia yang perlu dilindungi dan dipenuhi, khususnya mata pencaharian, namun bukan sebagai ancaman nasional maupun internasional (Boas, 2014).

Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pemerintah India menganggap migrasi iklim lintas batas ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Pemerintah India tidak menganggap hal tersebut sebagai ancaman nasional maupun internasional, karena menganggap bahwasanya migran lintas batas negara ini bukanlah sebuah masalah penting. Sementara, isu migran di wilayah perbatasan antara Bangladesh dan India dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan.

Kebijakan negara ini lebih berfokus pada pembangunan energi perkotaan dan pedesaan dibandingkan perubahan iklim dan dampak yang datang setelahnya. Pejabat pemerintah berpendapat bahwa masalah migrasi iklim ini tidak perlu dibuatkan sebuah kebijakan dalam menghadapinya, sehingga permasalahan tersebut tidak mendapatkan perhatian lebih. India menolak adanya gagasan mengenai mobilitas penduduk akibat perubahan iklim karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan “konstruksi” negara Barat dalam negosiasi perubahan iklim.

Ancaman perubahan lingkungan sebagai ancaman non – militer, dari sekian banyaknya ancaman lingkungan yang timbul, di akhir abad ke-20, peningkatan efek rumah kaca merupakan yang paling signifikan (Edwards, 2010). *Small Island Development States* (SIDS) atau negara kepulauan kecil

dan berkembang telah menjadi promotor aktif mengenai gagasan utama keamanan iklim dan kekhawatiran mereka terhadap keberlangsungan hidup. Keamanan manusia di wilayah Pasifik juga salah satu yang terancam.

Selain Kiribati, negara berkembang kepulauan kecil, yaitu Tuvalu, merupakan salah satu yang juga mengalami dampak perubahan iklim global. Penelitian yang dilakukan sebelumnya di kawasan Pasifik Selatan mengenai *sea level rise*, diantaranya berfokus pada negara kepulauan ini. Tuvalu memiliki fokus pada upaya migrasi internal penduduk akibat perubahan lingkungan. Lingkungan alam Tuvalu menjadi dasar penghidupan masyarakat di negara kepulauan ini selama bertahun-tahun. Namun, akibat dampak gelombang tinggi yang timbul, dan naiknya permukaan air laut menyebabkan penurunan akses terhadap sumber pangan. Hal ini menyebabkan efek urbanisasi, Pemerintah Tuvalu menyarankan migrasi internal masyarakat ke pulau utama, Funafuti, karena adanya perubahan alam dan ketergantungan masyarakat terhadap impor pangan. Ketergantungan terhadap impor pangan ini menimbulkan dua masalah lainnya, yaitu: (1) peningkatan penyakit menular; dan (2) limbah. Kedua masalah tersebut membahayakan keamanan manusia (Fisher, 2012).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Tuvalu mengalami perubahan biofisik akibat perubahan iklim dan mempengaruhi kehidupan individu didalamnya. Akibatnya, kondisi lingkungan semakin buruk dan menciptakan masalah lingkungan. Ancaman biofisik yang dialami Tuvalu ini menimbulkan kerentanan sosial. Masalah lingkungan yang dihadapi ini seperti sanitasi, pembangunan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga

keanekaragaman hayati. Hal tersebut tentu saja mengubah sistem pendukung kehidupan masyarakat Tuvalu.

Merupakan sebuah hal yang nyata bahwa *climate change* mempengaruhi kemandirian masyarakat, kapasitas pemerintah, dan juga kemiskinan. Seperti yang telah ditunjukkan, bahwa kerentanan individu ini mengarah pada terbatasnya pangan. Hal tersebut mengarah pula pada masalah kesehatan yang meningkat. Tuvalu merupakan salah satu contoh dinamika kompleks, dimana pemerintah dan masyarakat tidak dapat merespons secara memadai terhadap tekanan perubahan lingkungan, sehingga menyebabkan beberapa tempat tidak layak huni.

Masyarakat ditantang untuk memiliki kemampuan beradaptasi. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam menghadapi dampak iklim, tiap individu harus mengenali, menggambarkan, dan mengukur bagaimana perubahan lingkungan ini dapat mempengaruhi keamanan mereka. Kerusakan rumah akibat perubahan iklim, hilangnya mata pencaharian, dan kesehatan masyarakat, menyebabkan hilangnya kebutuhan dasar. Ancaman yang timbul tersebut, mengacu pada konsep keamanan mata pencaharian, pembangunan, dan gagasan perpindahan akibat iklim, yang merupakan bagian dari keamanan individu.

Penelitian ini akan berbeda dengan *literature* sebelumnya yang juga berfokus pada ancaman keamanan individu akibat dari perubahan iklim. Seperti yang telah disebutkan pada *literature* sebelumnya, beberapa penduduk terdampak iklim melakukan migrasi internal ke pusat kota untuk memenuhi

kebutuhan pangan. Penulis akan berfokus pada upaya adaptasi lainnya, yaitu migrasi eksternal yang melewati batas negara. Hal tersebut seharusnya mendapatkan perhatian khusus, baik itu secara nasional dan internasional. Penelitian ini juga akan berfokus pada pentingnya sebuah kebijakan yang dijalankan oleh aktor negara maupun aktor non – negara untuk memberikan rasa aman bagi tiap individu dari segala bentuk ancaman, salah satunya adalah *sea level rise*.

B. Foreign Aid

Sepanjang sejarahnya, *foreign aid* bertujuan untuk memberikan bantuan pembangunan di seluruh dunia untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin di negara berkembang. Bantuan luar negeri, umumnya berupa dana pinjaman ataupun hibah. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada *climate aid* atau bantuan luar negeri dalam menghadapi masalah perubahan iklim. Khususnya jenis bantuan seperti program pendidikan atau teknologi dari negara donor, tentu saja dirasa dapat memberikan manfaat besar bagi negara penerima yang terdampak langsung oleh krisis lingkungan.

Ada berbagai definisi dari teori *foreign aid* yang digunakan oleh berbagai praktisi maupun ahli dalam menjelaskan isu – isu pembangunan. Teori bantuan luar negeri berkaitan dengan hubungan antar negara. Oleh karena itu, para ahli mengaitkan bantuan luar negeri dengan teori dalam hubungan internasional. Paradigma realisme, menganggap bantuan luar negeri sebagai instrumen untuk meningkatkan kekuatan nasional dan keamanan negara donor (negara pemberi bantuan). Sementara paradigma idealis menganggap bahwa

bantuan luar negeri merupakan motif kemanusiaan dan sumber kerja sama antara negara donor dan negara penerima. Para marxis menganggap *foreign aid* sebagai alat eksploitasi kapitalis dan menyebabkan kesenjangan ekonomi antara negara industri kaya dan negara dunia ketiga yang disebut negara berkembang atau negara miskin. Sedangkan dalam pandangan konstruktivis, bantuan luar negeri dianggap sebagai cerminan nilai moral (Nigatu, 2015).

Menurut pandangan realis, program bantuan luar negeri ini diasumsikan sebagai kepentingan negara pemberi yang bersifat politik, dan ekonomi. Alasannya ialah selama ini negara – negara saling curiga dalam sistem internasional yang penuh anarki dan bahaya. Sehingga mereka memaksimalkan kekuatan, dan keamanan mereka. Pandangan idealis yang berpendapat bahwa *foreign aid* diberikan karena optimisme dan kewajiban moral maupun rasa kemanusiaan. Bantuan tersebut dianggap sebagai instrumen setiap negara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah.

Foreign aid didefinisikan sebagai transfer sumber daya secara sukarela dari satu negara ke negara lain. Transfer ini mencakup aliran modal apa saja ke negara – negara berkembang. Menurut Marcel Mauss, kategori *foreign aid* yang bersifat *giving*, hibah atau pemberian sukarela dilakukan untuk menciptakan ikatan hubungan sosial antara negara pemberi dan penerima bantuan. Menurutnya, terdapat tiga elemen untuk hal tersebut, yaitu (1) memberi, hal tersebut membentuk ikatan sosial; (2) menerima, karena menolak bantuan sama halnya dengan menolak ikatan hubungan sosial; (3) *reciprocating*, menunjukkan kehormatan, kekayaan, dan juga kedudukan negara. Pelaksanaan *foreign aid*

yang dilaksanakan tanpa pamrih dan sukarela ini, menciptakan dan memelihara hubungan sosial antar negara, bahkan ada pula kewajiban negara penerima donor untuk memberikan ‘hadiah’ bantuan tersebut di masa depan. Mauss membedakan balasan bantuan dari negara penerima dalam dua bentuk alokasi sumber daya lainnya. Yaitu pertukaran ekonomi, atau redistribusi sosial (Mawdsley, 2012).

Sebagian besar bantuan luar negeri ini datang dari negara industri barat. *Foreign aid* terbagi dalam beberapa kategori, diantaranya: (1) bilateral, bantuan ini diberikan dari satu negara ke negara lain secara langsung; (2) multilateral, diberikan oleh negara donor melalui lembaga atau organisasi internasional seperti PBB, WBG, atau IMF. Bantuan tersebut didistribusikan ke negara berkembang (Thapa, 2020). Oleh karena itu, jumlah bantuan luar negeri semakin meningkat karena telah disalurkan terutama melalui lembaga internasional, diantaranya *International Monetary Fund* (IMF) dan juga *World Bank Group* (WBG).

Bantuan luar negeri dapat diberikan sebagai tanda persetujuan diplomatik. Digunakan untuk mencapai tujuan politik suatu pemerintah, dengan itu negara donor mendapatkan pengakuan diplomatik. Selain itu, negara donor dapat meningkatkan aksesibilitas para diplomatnya ke negara lain.

Bantuan dan juga lembaga yang mendistribusikan merupakan elemen penting dari respons global terhadap tantangan. *Foreign aid* dapat menjadi salah satu pemain penting dalam mencapai pembangunan dan tujuan global. Diperlukan reformasi dan tindakan politik yang sesuai. Struktur lembaga

internasional sebagai penyalur bantuan luar negeri harus dikombinasikan dengan kerangka kebijakan yang diperlukan (Arndt & Tarp, 2017).

Menurut Svensson, dalam laporannya dituliskan bahwa bantuan luar negeri memiliki dampak positif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara penerima donor, namun tidak pada negara yang berperingkat rendah dalam hak sipil dan kebebasan politik. Demikian pula, Burnside dan Dollar menemukan bahwa efektifnya bantuan dari negara donor hanya ketika pemerintahan negara penerima telah memiliki kebijakan ekonomi yang cukup baik (Bearce & Tirone, 2010).

Bantuan dana dalam *foreign aid* pada umumnya digunakan untuk membangun sektor – sektor utama perekonomian dan juga mendorong proses pembangunan, terutama pada sektor yang kurang berkembang. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya satu – satunya tujuan dari bantuan luar negeri. Namun, pertumbuhan dan pembangunan sangatlah penting untuk mencapai tujuan lainnya seperti keamanan, hak asasi manusia, dan juga demokrasi (Griffiths & O’Callaghan, 2002).

Menurut Montgomery, *foreign aid* di sisi lain dianggap sebagai kekuatan politik luar negeri dan masalah politik luar negeri, terlepas dari keberhasilan dan kegagalannya. Karena itu, tujuan, kegunaan, dan pencapaian, serta proses pemberian dan penerimaannya melibatkan ideologi dan kekuasaan (Nigatu, 2015). Dengan demikian, faktor domestik utama baik dalam negara donor dan penerima mempengaruhi kondisi bagaimana program bantuan luar negeri di kelola.

Mayoritas negara di seluruh dunia terlibat dalam proses bantuan luar negeri, sebagai donor, penerima, atau seringkali, keduanya. Negara menggunakan bantuan luar negeri sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Kepentingan strategis negara – negara donor merupakan salah satu faktor pendorong adanya program bantuan luar negeri. Negara donor memutuskan negara mana yang akan menerima bantuan, jumlah bantuan yang diberikan, kerangka waktu pemberian bantuan, dan juga proses penyaluran bantuan. Pemberian bantuan oleh negara donor ditentukan dengan tingkat pemerintahan penerima donor, didalamnya ditentukan jenis dan sektor bantuan luar negeri yang diberikan. Negara donor dapat memilih antara metode bilateral atau multilateral dalam menyalurkan bantuan dan juga mencapai tujuan mereka.

Program bantuan ini dirancang dan diimplementasikan sebagai ekspresi norma di mana negara kaya memberikan bantuan kepada negara miskin untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup mereka. Hal tersebut menjadi landasan utama pemberian *foreign aid* kepada negara berkembang.

Kekhawatiran tentang perubahan iklim terus meningkat, beserta dengan bukti ilmiahnya. Dalam pencegahan dampak perubahan lingkungan ini dibutuhkan penghapusan emisi karbon selama beberapa dekade berikutnya. Tantangan yang dirasakan negara berkembang akibat dampak perubahan tersebut, dirasa perlu untuk melakukan langkah mitigasi dan adaptasi yang membutuhkan dana besar dalam upaya menghadapi efek perubahan iklim (Kono & Montinola, 2019).

Salah satu cara untuk membantu negara berkembang ataupun miskin dalam menanggapi tantangan ini ialah dengan meningkatkan bantuan asing atau *foreign aid* terkait iklim, bantuan ini disebut *climate aid*. Bantuan ini dapat berupa biaya ekonomi untuk melakukan langkah – langkah mitigasi bagi negara berkembang, insentif dari negara pemberi ke negara penerima ini bisa saja diadopsi menjadi sebuah kebijakan.

Pemberian bantuan luar negeri secara bilateral memungkinkan negara donor memiliki kendali penuh atas donasi bantuan yang diberikan. Sementara pemberian bantuan secara multilateral dengan menggunakan lembaga internasional seperti *World Bank Group* dan *International Monetary Fund*, membuat negara donor dapat memberikan bantuan dengan anggaran yang lebih sedikit daripada bilateral. Selain itu, bantuan multilateral ini menyebarkan akuntabilitas dan sering dipandang kurang bias politik (Apodaca, 2017).

Bantuan asing ini telah menjadi salah satu upaya dalam memerangi perubahan iklim. Sebelumnya, dalam konferensi iklim di Copenhagen pada tahun 2009, negara maju menjanjikan 100 miliar USD pertahun untuk membantu negara miskin dan berkembang melakukan mitigasi ataupun adaptasi. Komitmen ini dimuat dalam pasal 9 Perjanjian Iklim Paris yang diadakan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Kono & Montinola, 2019). Penandatanganan komitmen ini menunjukkan betapa serius-nya negara menangani perubahan iklim melalui kebijakan.

Sebelumnya melalui Protokol Kyoto, beberapa negara donor meningkatkan partisipasi bantuan kepada negara miskin dan berkembang. Protokol Kyoto membahas mengenai upaya mitigasi dan adaptasi melalui dana finansial untuk membiayai transisi teknologi yang lebih hijau, dan juga *Clean Development Mechanism* (CDM) (Kono & Montinola, 2019). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peningkatan temperature bumi dengan mengurangi produksi gas rumah kaca (GH4).

Small Island Development States (SIDS) memiliki kecenderungan menerima lebih banyak dana untuk adaptasi terhadap perubahan iklim di masa depan. Pendanaan ini bisa saja dalam bentuk pinjaman atau pemberian sukarela untuk pembangunan atau reformasi berbagai sektor seperti air, kesehatan, perikanan, dan pertanian. Bantuan ini dapat memberikan efek beragam pada keberlanjutan pembangunan di negara kepulauan kecil dan berkembang. Efek tersebut tergantung pada kapasitas tiap – tiap negara untuk beradaptasi.

Penyesuaian terhadap bantuan asing dalam mengurangi dampak kerentanan terhadap perubahan iklim ini dapat diamati dengan mempelajari dampak kerusakan yang timbul. Kapasitas adaptif negara penerima bantuan ini dilihat dari fungsi dari sejumlah bantuan, seperti: (1) sumber daya keuangan untuk proses adaptasi; (2) tata kelola, seberapa baik masyarakat dapat menjalankan proses adaptasi; (3) sumber daya sosial, ikatan antara individu dan kelompok yang tanggap terhadap perubahan lingkungan; dan (4) infrastruktur dan teknologi yang membantu proses adaptasi (Barnett, 2008).

Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini mulai dirasakan dampaknya oleh salah satu negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan, yaitu Nieu. Nieu bukanlah negara berdaulat, namun negara ini memiliki pemerintahan sendiri dan ber-asosiasi dengan Selandia Baru atau *New Zealand*. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pada pola iklim regional, termasuk munculnya fenomena *El Nino*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah Nieu telah berupaya untuk memenuhi kenaikan biaya pemeliharaan infrastruktur beserta anggarannya akibat dampak *sea level rise*. Masalah lingkungan yang dihadapi negara ini adalah banjir di wilayah pesisir akibat gelombang tinggi dan fenomena *El Nino*. Fenomena tersebut menyebabkan peningkatan curah hujan tahunan di Nieu. Negara ini terletak di jalur siklon tropis selatan dan mengalami badai topan dengan potensi kerusakan tinggi. Peningkatan hujan dan angin yang tinggi menyebabkan masyarakat mengalami kerentanan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik tidak dapat terpenuhi, jalanan rusak dan juga terbatasnya pasokan air. Biaya yang diperlukan ini dapat dipenuhi oleh bantuan asing dari Selandia Baru. *Foreign aid* yang diberikan ini memberikan akses subsidi listrik, air minum, dan saluran air bersih bagi masyarakat Nieu. Bantuan ini sangat efektif untuk menjaga kualitas pelayanan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2007, diperkirakan 6.915.000 NZ\$ mengalir ke Nieu untuk proyek adaptasi (Barnett, 2008). *Climate aid* ini tentu saja diberikan karena adanya negosiasi tahunan antara pemerintah negara Selandia Baru dan Nieu.

Dalam proses menghadapi perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi memerlukan suntikan dana bantuan dari negara donor. Sebagian besar negara – negara yang rentan akan iklim berasal dari negara berkembang dan membutuhkan sebuah tindakan untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan. Pilihan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi ini tergantung pada situasi ekonomi suatu negara. Namun, upaya mitigasi tentu saja membutuhkan biaya lebih besar dalam berbagai aspek, salah satunya adalah teknologi.

Perlindungan wilayah pesisir dapat dipenuhi dengan adanya teknologi yang memadai. Teknologi yang dibutuhkan negara dengan wilayah pesisir ini dapat berupa alat hidrolik di kawasan pantai untuk melindungi dari banjir rob dan juga erosi pantai (Linhm & Nicholls, 2010). Adanya penghalang antara darat dan laut dapat menahan pasang surut gelombang tinggi. Pemeliharaan teknologi juga membutuhkan pemeliharaan, pemantauan berkelanjutan, dan diperlukan biaya tambahan. Hal tersebut cukup menyulitkan bagi negara berkembang, sehingga cenderung menjadikan upaya adaptasi sebagai prioritas.

Kerentanan akibat persoalan lingkungan ini juga dirasakan salah satunya di kawasan Asia Selatan. Dalam penelitian studi sebelumnya, kawasan ini mengalami lebih banyak kekeringan, banjir, naiknya permukaan air laut, dan juga penurunan produksi pangan. Salah satu yang terdampak adalah Bangladesh. Negara ini perlu mempersiapkan strategi jangka panjang (Islam, n.d.)

Dalam aspek yang lebih luas, *foreign aid* untuk mengatasi perubahan iklim merupakan jenis bantuan untuk pembangunan. Dalam beberapa tahun

terakhir, seiring dengan meningkatnya berbagai *project* global mengenai perubahan iklim membuat *climate aid* ini mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah *climate aid* terhadap Bangladesh. Jepang merupakan salah satu mitra pembangunan yang telah lama dipercaya oleh Bangladesh.

Jepang dan Bangladesh telah memiliki sejarah panjang sebagai mitra kerja sama, pada tahun 2008, Bangladesh menerima bantuan dari Jepang untuk pencegahan dan rekonstruksi bencana alam berupa penampungan siklon dan peringatan cuaca. Bantuan ini diklasifikasikan oleh Jepang sebagai program bantuan sukarela untuk lingkungan dan perubahan iklim. Pada tahun 2009, bantuan Jepang kepada Bangladesh mulai fokus pada perubahan iklim. Bangladesh menerima bantuan sebesar 1.5 juta JPY atau setara dengan 14.8 juta US\$ untuk adaptasi (Rahman, 2019).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup *foreign aid* sebagai faktor pendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. *Foreign aid* dari negara donor kepada negara penerima ini sebagai upaya mengurangi kerentanan individu dan resiko-nya dengan meningkatkan aksi adaptif masyarakat di negara terdampak.

Bantuan luar negeri datang dengan target dan tujuan tertentu. Masyarakat dalam suatu negara selalu menjadi fokus utama pemberian bantuan. *Foreign aid* sebagai salah satu upaya yang menjembatani kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, serta individu di negara penerima.

Bantuan luar negeri dapat menjadi penyeimbang antara mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor. Khususnya infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan

teknologi. Penelitian ini akan berbeda dengan *literature* yang telah dikaji sebelumnya, penulis akan berfokus pada jenis bantuan asing lainnya, seperti bantuan program pendidikan dan keterampilan bagi penduduk negara penerima bantuan sebagai upaya meningkatkan *skill* individu di negara penerima donor tersebut.